II. TINJAUAN PUSTAKA

Manusia hidup dalam kebersamaan menunjukkan bahwa manusia adalah umat yang satu. Dengan kebersamaan itu manusia berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan direalisasikan dengan berbagai jenis aktivitas, serta bermacam-macam hubungan antara sesama mereka. Kebersamaan merupakan sarana atau ruang gerak bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi tanpa kebersamaan manusia tidak mampu hidup sendiri, dan ketergantungan itu yang menjadikan manusia sebagai makhluk sosial.

Bangsa Indonesia merupakan bangsa *religius* dengan berbagai etnis yang ada, maka dapat timbul suatu masalah yang menyangkut masalah keharmonisan masyarakat antar etnis. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan dan memelihara keharmonisan hidup antar etnis, berarti dari masing-masing etnis harus mampu mencerminkan nilai budaya yang baik dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan identitas bangsa Indonesia. Dengan demikian dapat tercipta suatu kerukunan hidup antar etnis yang lebih baik.

Indonesia adalah suatu negara yang berbentuk multi budaya, multi etnis, agama, ras, dan multi golongan, etnis merupakan kebudayaan yang telah ada bahkan sebelum suatu negara merdeka, dengan berbagai nilai dan norma yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat sebelum adanya hukum dalam bentuk Undang-

undang. Etnis di Indonesia sendiri sangat beraneka ragam dan dengan berbagai nilai yang diyakini oleh individu-individu dalam anggota etnis tersebut. Hingga saat ini, Negara Indonesia terkenal dengan kearifan lokal etnis yang sangat majemuk dan penuh dengan nilai seni yang tidak terdapat di negara-negara lain.

Agama adalah tuntunan yang kita terima sebagai sebuah kepastian hidup. Dogma tidak terbantah dan harus diterapkan agar kehidupan kita menjadi lebih baik. Dengan beragama maka kehidupan menjadi lebih nyaman dan terarah serta teratur. Tidak ada lagi tindakan-tindakan anarkis yang mengatasnamakan kemanusiaan.

Menurut Shri Danu (2009), pengendalian diri, etika dan toleransi merupakan pencerminan kehidupan beragama dengan sesama atau antar etnis, baik manusia dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara bahkan dalam hubungan internasional antar bangsa-bangsa. Dengan kekayaan akan perbedaan, seharusnya negara dapat lebih cepat dan berkembang dalam kemajuan etnis dan budaya karena kedewasaan dalam menerima hal-hal baru di sekitar mereka.

2.1 Teori-teori Keharmonisan Hubungan Antar Etnis

Harmonis dalam kehidupan dapat tercipta apabila tiap-tiap orang itu saling tenggang rasa dan lapang dada (toleransi). Termasuk dalam hal ini adalah penciptaan kondisi hidup penuh Keharmonisan antar etnis yang sangat menentukan kondisi kehidupan kita di masyarakat. Menurut Roland Robertson (1988), ada beberapa teori tentang usaha untuk menciptakan kerukunan dalam kehidupan yang beragam itu adalah :

1. Tradisionalisme dan warisan budaya bersama

   Mereka menginginkan nilai-nilai harmoni dan kerja sama dipertahankan, bertentangan dengan perselisihan secara terbuka, untuk menindih perasaan secara sopan, dan bertingkah laku menurut nilai-nilai status yang masih mempunyai beberapa kekuatan, juga untuk orang-orang muda yang paling modern.

2. Nasionalisme dan proyeksi kebudayaan bersama yang baru

   Kecenderungan yang lebih nasionalistik pada orang juga bersandar pada nilai-nilai nasionalis bersama, karena doktrin nasionalisme, dalam banyak hal berusaha menyatakan kembali nilai-nilai itu dalam bentuk yang lebih digeneralisasi; tetapi diatas semua itu, orang yang nasionalistik menghendaki berbagai macam aspirasi yang dirangsang oleh kontak dengan dunia luar.

3. Toleransi dan integrasi sosial yang majemuk

   Dua hal terakhir yang meredam konflik keagamaan-toleransi yang didasarkan atas relativisme kontekstual dan pertumbuhan mekanisme sosial bagi bentuk integrasi sosial nonsinkretik yang majemuk.

2.2 Pengertian Keharmonisan Hubungan Antar Etnis

Keharmonisan adalah istilah yang dipenuhi muatan makna “baik” dan “damai”. Intinya hidup bersama dalam masyarakat dengan kesatuan hati dan bersepakat untuk tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran. Keharmonisan hubungan antar etnis adalah suatu kondisi sosial dimana semua golongan etnis dan budaya bisa hidup berdampingan tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk

melaksanakan kewajiban kulturnya. Masing-masing hidup sebagai penganut budaya yang baik dalam keadaan harmonis dan damai.

Menurut Amirulloh Syarbini dkk (2011: 73, 111), rukun berarti berada dalam keadaan selaras, tenang dan tentram tanpa perselisihan dan pertentangan, bersatu dalam maksud untuk saling membantu. Berprilaku rukun berarti menghilangkan tanda-tanda ketegangan dalam masyarakat atau antara pribadi-pribadi sehingga hubungan-hubungan sosial tetap terlihat selaras dan baik. Kata rukun dan kerukunan mempunyai pengertian damai dan perdamaian dalam kehidupan sehari-hari. Kerukunan jelas hanya dipergunakan dalam dunia pergaulan atau interaksi sosial dimasyarakat.

Keharmonisan hubungan antar etnis pada dasarnya adalah Keharmonisan yang terwujud di antara beberapa etnis di dalam kehidupan sosial tanpa mempersoalkan agama, kepercayaan, atau etnis yang dianut oleh anggota masyarakat. Sedangkan etnis yang dianut oleh masig-masing orang dalam masyarakat tersebut tentu saja tidak bisa harmonis atau diharmoniskan karena masing-masing etnis memiliki ajaran yang berbeda dan khas. Dengan Keharmonisan hubungan antar etnis, masyarakat menyadari bahwa negara adalah milik dan tanggung jawab bersama.

Oleh karena itu, keharmonisan antar etnis adalah kerukunan hakiki yang dilandasi dan dijiwai oleh nilai-nilai etnis masing-masing. Dengan adanya Keharmonisan hubungan antar etnis akan terjamin dan terpelihara stabilitas sosial sebagai syarat mutlak untuk berhasilnya pembangunan. Selain itu dengan adanya kerukunan hidup antar etnis, maka potensi etnis yang demikian besar dapat dimanfaatkan untuk memperlancar pembangunan. Keharmonisan akan mudah diwujudkan

apabila ada persamaan latar belakang sejarah, penderitaan, cita-cita, dan keserasian dalam banyak hal.

Usaha ini tidak dapat dijalankan oleh 1 atau 2 orang saja, akan tetapi harus dilakukan oleh masing-masing kita atau setiap individu masyarakat. Sebab, ini mengenai satu segi dari ideologi pancasila yang harus kita dukung, kita tumbuh suburkan dalam masyarakat seluruh bangsa kita umumnya. Karena kita bangsa Indonesia sering membanggakan atau dibanggakan sebagai bangsa yang bertoleransi dan berkerukunan yang tinggi.

Hal-hal rinci seperti ekspresi-ekspresi simbolik dan formalistik, tentu sulit dipertemukan. Masing-masing etnis dan budaya bahkan sesungguhnya masing-masing kelompok intern suatu etnis tertentu sendiri mempunyai idiomnya yang khas dan bersifat esoterik, yakni hanya berlaku secara intern. Karena itulah ikut campur etnis lain atau pemaksaan doktrin etnis dalam internal orang dari etnis lain adalah tidak rasional dan *absurd.*

Menurut Ridwan Lubis (dalam Azhari Akmal Tarigan, 2011), yang merupakan tokoh kerukunan umat beragama di Sumatera Utara, Keharmonisan hubungan adalah terbinanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dari setiap etnis, budaya, atau umat beragama. Keseimbangan antara hak dan kewajiban itu adalah usaha yang sungguh-sungguh dari setiap anggota untuk menerapkan seluruh nilai-nilai budayanya. Pada saat yang sama, penerapan ajarannya tidak pula bersinggungan dengan kepentingan orang lain yang juga memiliki hak dan kewajiban untuk menerapkan nilai-nilai.

Sepertinya sikap yang penuh inklusifisme ini harus kita pahami betul demi kebaikan kita semua. Bahwa setiap penganut etnis diharapkan menerapkan nilai-nilai budaya yang baik dengan sungguh-sungguh, dan untuk etnis yang lain, seperti yang telah diteladani dapat menyaring budaya lain sebagai proses asimilasi untuk memperkaya budayanya.

Kita percaya bahwa tidak ada satu etnispun di muka bumi ini yang menanamkan nilai-nilai pada masyarakatnya untuk melakukan kekerasan dan permusuhan. Nilai-nilai normatif budaya selalu mendendangkan kedamaian dan ketenteraman antar sesama dalam bermasyarakat. Kendati demikian, tidak tertutup kemungkinan penafsiran atau pemahaman anggota etnis yang salah dapat menjadi pemicu terjadinya disharmonisasi antar etnis.

Menurut A.R. Radcliffe Brown (dalam Koentjaraningrat 1990: 173), hubungan antar individu dalam masyarakat adalah hal yang konkret yang dapat diobservasi dan dapat dicatat. Inilah suatu cara menjaga keseimbangan dalam kemajemukan masyarakat yang sangat kompleks dan terus berkembang dalam berbagai perbedaan. Menurut Hunt dan Walker menyatakan (dalam Hartoyo, 1996), bahwa basis dari aspek interaksi dari integrasi ialah mengendurnya diskriminasi yang berakar pada perbedaan-perbedaan etnik, budaya dan agama tersebut.

Selain itu juga, menurut Ioanes Rakhmat (2011), untuk dapat membuat kemajemukan sebagai sebuah unsur pemersatu dan penginspirasi bangsa, setiap orang di Indonesia, apapun etnis dan aliran keagamaannya (atau aliran kepercayaannya), perlu memandang etnisnya sebagai komplemen atau unsur pelengkap bagi etnis lainnya. Sebab, unsur yang potensial dapat saling

memperkaya, baik dalam doktrin antar etnis maupun dalam praktek kehidupan bermasyarakat.

Menurut Nasikun (dalam Hartoyo, 1996), masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang terdiri lebih dari 300 kelompok etnik yang terbagi menjadi beberapa agama, masing-masing hidup dengan ciri bahasa dan identitas kulturnya. Setiap etnis memiliki doktrin akan kerukunan dalam berkehidupan sosial, selain itu doktrin untuk selalu menjunjung tunggi nilai-nilai gotong royong atau saling membantu antar sesama.

Menurut Azhari Akmal Tarigan (2011), untuk dapat memandang setiap etnis sebagai sebuah pelengkap bagi etnis lainnya yang berbeda, dan untuk dapat saling memperkaya antara etnis yang satu dan etnis yang lainnya, orang beretnis apapun harus sudah terbebas dari dogma superiorisme, yakni dogma atau akidah yang memandang etnis sendiri sebagai etnis pemenang yang mengungguli semua etnis lainnya dalam segala segi. Karena demikianlah nilai yang dikembangkan adalah nilai plural dan kebersamaan kita sebagai makhluk sosial.

Selain itu juga bangsa Indonesia ini merupakan bangsa yang multikultural, dimana banyak budaya yang ada sejak dahulu dan terus berkembang. Multikulturalisme berasal dari dua kata; *multi* (banyak/beragam) dan *cultural* (budaya atau kebudayaan), yang secara etimologi berarti keberagaman budaya. Budaya yang mesti dipahami, adalah bukan budaya dalam arti sempit, melainkan mesti dipahami sebagai semua dialektika manusia terhadap kehidupannya.

Dialektika ini akan melahirkan banyak wajah, seperti sejarah, pemikiran, budaya verbal, bahasa dan lain-lain. Mengutip S. Sapta Atmaja dari buku *Multiculturalism Educations: A Teacher Guide To Linking Context, Process And Content* karya Hilda Hernandes (dalam Nuraini Azizah, 2010), bahwa multikulturalisme adalah bertujuan untuk kerjasama, kesederajatan dan mengapresiasi dalam dunia yang kian kompleks dan tidak monokultur lagi. Multikulturalisme adalah sebuah ideologi dan sebuah alat untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiaannya. Untuk dapat memahami multikulturalisme diperlukan landasan pengetahuan berupa bangunan konsep-konsep yang relevan dan mendukung keberadaan serta berfungsinya multikulturalisme dalam kehidupan manusia.

Bangunan konsep-konsep ini harus dikomunikasikan di antara para ahli yang mempunyai perhatian ilmiah yang sama tentang multikulturalisme, sehingga terdapat kesamaan pemahaman dan saling mendukung dalam memperjuangkan ideologi ini. Berbagai konsep yang relevan dengan multikulturalisme antara lain adalah, demokrasi, keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan yang sederajat, sukubangsa, kesukubangsaan, kebudayaan sukubangsa, keyakinan keagamaan, ungkapan-ungkapan budaya, domain privat dan publik, HAM, hak budaya komuniti, dan konsep-konsep lainnya yang relevan.

Lebih jauh Menurut Parsudi Suparlan (2002 dalam Nuraini Azizah, 2010), akar kata dari multikulturalisme adalah kebudayaan, yaitu kebudayaan yang dilihat dari fungsinya sebagai pedoman bagi kehidupan sosial manusia. Dalam konteks pembangunan bangsa, istilah multikultural ini telah membentuk suatu ideologi

yang disebut multikulturalisme. Konsep multikulturalisme tidaklah dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara sukubangsa atau kebudayaan sukubangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk, karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan.

Demikian halnya pluralisme yang ada di Indonesia, yang hingga kini diakui oleh dunia barat sebagai penopang perkembangan pembangunan jika pemeliharaannya tepat. Pluralisme kultural di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, Malaysia dan Singapura, seperti dikemukakan Hefner (2001: 4 dalam Azyumardi Azra 2008) sangat mencolok; terdapat hanya beberapa wilayah lain di dunia yang memiliki pluralisme kultural seperti itu. Karena itulah dalam teori politik barat sepanjang dasawarsa 1930-an dan 1940-an, wilayah ini khususnya Indonesia dipandang sebagai "fokus klasik bagi konsep masyarakat majemuk/plural" (*plural society*) yang diperkenalkan ke dunia barat.

Menurut Furnivall (dalam Azyumardi Azra 2008), "masyarakat plural adalah masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih unsur-unsur atau tatanan-tatanan sosial yang hidup berdampingan, tetapi tidak bercampur dan menyatu dalam satu unit politik tunggal (Furnivall 1944: 446). Teori Furnivall ini banyak berkaitan dengan realitas sosial politik Eropa yang relatif homogen, tetapi sangat diwarnai etnis, rasial, agama dan gender. Berdasarkan kerangka sosial-kultural, politik dan pengalaman Eropa, Furnivall memandang masyarakat-masyarakat plural Asia Tenggara akan terjerumus ke dalam anarki jika gagal menemukan formula federasi pluralis yang memadai (Azyumardi Azra, 2008).

Meski demikian, berbeda dengan *doomed scenario* Furnivall, masyarakat-masyarakat plural Asia Tenggara, khususnya Indonesia, pada akhirnya setelah perang dunia II dapat menyatu dalam satu kesatuan unit politik tunggal. Tetapi harus diakui, kesatuan politik tidak menghilangkan realitas pluralitas sosial-budaya yang bukannya tidak sangat divisif, khususnya jika negara-bangsa baru seperti Indonesia gagal menemukan *common platform* yang dapat mengintegrasikan berbagai keragaman itu.

2.3 Landasan Keharmonisan Hubungan Menurut Masing-masing Agama

Keharmonisan antar etnis ternyata bukan hanya merupakan program dari pemerintah Indonesia saja, akan tetapi jauh sebelumnya dalam setiap ajaran agama yang ada di Indonesia, keharmonisan antar sesama sudah diajarkan. Landasan keharmonisan antar etnis menurut masing-masing agama dimaksudkan untuk lebih memantapkan keharmonisan itu sendiri. Dalam pembahasan selanjutnya akan dijelaskan tentang landasan keharmonisan antar etnis menurut agama yang ada di Indonesia, sebagai berikut:

2.3.1 Landasan Keharmonisan Antar Etnis dalam Agama Islam

Agama Islam sebagai agama yang sempurna bukan hanya mengajarkan agar penganut-penganutnya hidup harmonis di antara sesama umat Islam saja. Islam menggariskan agar sesama manusia dalam hidupnya saling menyayangi dan mencintai, hormat menghormati dan saling menghargai seperti dalam Al-Quran surat Al Hujurat (ayat 13) yang artinya:

> Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.

Hal ini sudah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad SAW, baik berupa peraturan yang dibuat dan diakui bersama maupun dalam bentuk praktek sehari-hari. Suatu contoh praktek Nabi tentang toleransi dalam bantuk peraturaan dapat diketahui dari praktek yang dilakukan Rasulullah SAW, dalam rangka usaha pertamanya membentuk suatu umat baru di Madinah yang dalam sejarah menurut Muhammad Riva'i (1984, dalam Skripsi Ahmad Zarkasi, 1997) terkenal dengan nama "Kitabul Nabi" atau piagam tertulis dari Nabi Muhammad. Piagam tersebut memuat sepuluh bab dengan memuat antara lain yaitu:

> Mengakui semua penduduk kota Madinah baik Islam maupun yang bukan Islam yang pada waktu itu adalah kaum Yahudi. Semua penduduk madinah tidak ada kecualinya diakui sebagai warga negara yang sama haknya dengan warga yang beragama Islam. Bukan kebebasan beragama yang diakui tetapi juga segala hak yang dimiliki oleh kaum muslimin sebagai warga negara, sebagai hak milik asasi pula bagi mereka.

Dari keterangan tersebut bahwasannya dalam ajaran Islam terdapat apa yang kini tengah masyarakat sebut dengan *Tasamuh* yakni sikap toleransi, penuh maaf dan maklum, suka mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain serta mau mengambil dan mengikuti yang baik. Kata lain yang identik dengan *tasamuh* adalah *tasahul* yang lazim memberikan makna bermudah-mudahan. Dengan demikian agama Islam secara positif mengandung adanya kerukunan umat beragama. Sikap toleransi dan kerukunan yang tertanam dalam setiap pribadi muslim adalah berdasarkan atas Al Qur'an dan As Sunnah. Syariat dalam agama Islam juga mengajarkan agar umat Islam tidak memaksakan orang-orang diluar penganut agama Islam untuk memeluk Islam. Karena masalah agama itu tidak bisa dipaksakan.

2.3.2 Landasan Keharmonisan Antar Etnis dalam Agama Kristen

Abineno (1990) Agama Kristan juga mengajarkan agar umatnya untuk hidup harmonis dan damai dengan orang-orang yang bukan pemeluk agama kristen. Landasan keharmonisan antar sesama manusia itu banyak ditemukan dalam Al-kitab. Karena itu di dalam buku pokok-pokok penting iman Kristen oleh Abineno disebutkan bahwa, diketahui bahwa Yesus Kristus hadir didunia untuk menyebarkan kedamaian. kedamaian di dunia dan kedamaian di hati manusia dengan jalan menjadi juru selamat manusia.

Banyak ditemukan dalam naskah kitab Injil yang memerintahkan bahwa sesama manusia harus hidup rukun dan damai. Hal ini merupakan sumber inspirasi bagi jemaat Kristen untuk menciptakan keharmonisan antar sesama manusia yang termasuk di dalamnya keharmonisan antar sesama umat beragama seperti yang dijelaskan dalam surat Roma 15:5 yang berbunyi:

> semoga Allah adalah sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai kehendak Yesus Kristus”

Ayat dalam kitab tersebut diatas adalah agar setiap penganut agama Kristen menciptakan keharmonisan kepada semua manusia yang ada di bumi ini. Sebagaimana yang diperintahkan atau dikehendaki oleh Yesus Kristus.

Agama Kristen, disamping mengajarkan sesama manusia saling hidup rukun dan damai, juga mengajarkan agar sesama manusia juga saling mengasihi dan menyayangi. Hal ini sesuai dengan perintah Al-kitab, surat Matius 22:37-39 yang berbunyi:

> Kasihi Tuhan Allah-mu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang kedua yang

> sama dengan itu ialah: kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan Kitab para Nabi.

Disamping ajaran-ajaran yang bersumber dari Al-kitab, ajaran tentang keharmonisan antar etnis dalam ajaran Kristen Katolik juga ada yang bersumber dari tradisi gereja. Sebagai contoh apa yang dijadikan konsolidasi di Vatikan II tahun 1962-1965 mengenai sikap Katolik roma. Hasil dari konsolidasi tersebut kemudian dengan kekuatan tradisi deklaratif dilegitimasi (disahkan) menjadi ajaran gereja Katolik. Isi dari dokumen tersebut dikutip oleh Karel A. Steinbrink sebagai berikut:

> Zaman kita adalah zaman umat manusia tambah hari tambah bersatu dan hubungan-hubungan antar bangsa berbeda semakin dilipatgandakan, maka gereja akan lebih seksama mempertimbangkan bagaimana sikapnya terhadap agama-agama bukan Nasrani. Dalam tugasnya memajukan kesatuan dan cinta kasih diantara orang-orang bahkan dinyatakan perhatian akan faktor yang mempersatukan manusia satu dengan yang lain serta faktor-faktor yang memperkokoh kesatuan itu.

Dari pernyataan yang diambil dari dokumen konsolidasi Vatikan II tersebut merupakan anjuran bagi gereja Katolik kepada seluruh jamaatnya agar hidup harmonis sesama manusia. Hal ini dimaksudkan untuk terwujudnya keharmonisan antar etnis, tentu saja tersusunnya hasil konsolidasi tersebut juga disadari adanya perintah dalam kitab suci mereka.

2.3.3 Landasan Keharmonisan Antar Etnis dalam Agama Hindu

Agama Hindu juga mengajarkan kepada umatnya agar dalam menjalani kehidupan di dunia ini umat Hindu selalu hidup harmonis dan damai dengan umat-umat lainnya. Hal ini tersebut karena dalam ajaran agama Hindu juga ditemukan ajaran-

ajaran tentang sikap toleransi keharmonisan antar etnis dan antar umat beragama. Dengan demikian apabila umat Hindu sudah melaksanakan ajarannya dengan baik, maka dapat tercipta sikap toleransi terhadap agama lain. Dari sikap tersebut dapat membantu terciptanya keharmonisan antar etnis antar umat beragama.

Ajaran tentang keharmonisan antar etnis antar umat beragama dalam ajaran agama Hindu, bersumber dari Kitab Reg Weda, Samha Weda, Yajur Weda, Atharwa Weda, dan Bagawat Gita. Sebagai contoh ajaran tentang keharmonisan antar etnis antar umat beragama ini menurut Budiyono HD (1973) terdapat dalam Reg Weda X.191 :2 yang berbunyi:

> Berkumpul, berbicaralah satu dengan yang lain. Bersatulah dalam semua pikiranmu, sebagai halnya para Dewa pada zaman dahulu bersatu.

Ayat dalam Reg Weda tersebut mengajarkan agar tiap penganut agama Hindu di dunia ini senantiasa bersatu terhadap sesama manusia. Seperti halnya para dewa zaman dahulu, walaupun tugas dan tanggung jawab setiap Dewa itu berlainan. Karena itu manusia dianjurkan untuk dapat hidup rukun dan damai sesama manusia, seperti para Dewa di masa dahulu. Dalam naskah lain menurut Budiyono, ditemukan perintah yang berkaitan dengan masalah keharmonisan antar etnis antar umat beragama yaitu dalam Atharwa Weda XIII.I :45 dalam ayat tersebut dijelaskan:

> Suatu harapan dari Sang Wyang Widhi Washa, agar manusia yang ada di bumi ini senantiasa hidup rukun damai walaupun manusia itu hidup dengan aturan yang berbeda, berbicara dengan bahasa yang tidak sama, mendiami tempat tinggal yang berlainan, akan tetapi dalam hidup bersama harus rukun dan saling mengasihi sebagaimana kehidupan lembu yang menyusul anaknya dengan penuh cinta kasih.

Kedua ayat dari Kitab Weda tesebut merupakan sumber ajaran tentang keharmonisan antar etnis antar umat beragama menurut tata aturan agama Hindu. Selain itu, menurut Shri Danu (2011) Kitab suci Weda juga menegaskan perlunya toleransi itu sebagai perwujudan pengamalan ajaran agama:

- Bumi ini tempat tinggal seluruh umat manusia, seperi keluarga, semuanya berbicara berbeda-beda dan menganut kepercayaan (agama) yang berbeda-beda, semua hendaknya seperti sapi-sapi yang bersatu salam satu kandang sapi kepadanya kesejahteraan akan berlimpah (Atharwa Weda XII.I.45)
- Bumi yang luas ini adalah ibu dan sahabat kita (Atharwa Weda IX,10,12)
- Marilah kita menghormati kemerdekaan (harkat dan martabat) seseorang (Reg Weda I.80.1)
- Wahai umat manusia, Aku memberikan kepadamu sifat-sifat yang ramah dan manis pupuklah keharmonisan dan persaudaraan tanpa permusuhan di antara kamu, seperti halnya seekor induk lembu terhadap anaknya yang baru lahir, demikianlah hendaknya kamu menyayangi sesamamu (Atharwa Weda III.83.8.)
- Wahai orang-orang dermawan, marilah kita wujudkan persaudaraan yang sederajat di dalam kandungan ibu pertiwi (Reg Weda VIII.83.8).
- Wahai umat manusia, maju teruslah kamu, jangan bertikai di antara kamu, engkau adalah pengikut untuk tujuan yang sama, hormatilah yang lebih tua, milikilah pikiran-pikiran luhur dan pusatkan perhatian pada kerja. Ucapkanlah kata-kata manis di antara kamu. Aku jadikan engkau semuanya bersatu dan Aku rakhmati engkau dengan pikiran-pikiran yang mulia (Atharwa Weda III.10.5)

Lebih jauh dalam susastra Weda yang lain dinyatakan:

- Hendaknya setiap orang tidak menyakiti makhluk lain, berpegang pada kebenaran (Dharma), tidak pemarah, melepaskan diri dari ikatan keduniawian, tentram dan tidak suka memfitnah, kasih sayang terhadap semua makhluk, tidak tamak, lemah lembut sopan santun dan teguh iman (Bhagawadgita, XVI.2.)
- Persembahan kepada Dewa-dewa, kepada pandita, kepada guru, kepada orang suci, jujur, kuat menahan hawa nafsu dan tidak menyakiti makhluk lain adalah pantangan diri sendiri di dunia (Bhagawadgita XVII.14.)
- Seseorang yang tidak menjalankan Dharma atau yang mendapatkan kakayaan dengan jalan curang dan orang yang suka menyakiti hati

> makhluk lain tidak akan pernah bahagia di dunia ini (Manavadharmasstra IV.170.).

2.3.4 Landasan Keharmonisan Antar Etnis dalam Agama Budha

Dalam Agama Budha-pun mengajarkan pada umatnya kebajikan kedua setelah taat kepada agama adalah memuliakan umatnya dalam hal kasih sayang yang diartikan membuat hati mereka bergetar ketika pihak lain mendapat penderitaan atau apa yang menghilangkan penderitaan umat lain. Ciri-ciri utamanya yaitu pengharapan untuk menghilangkan kesengsaraan umat lain. Dalam agama budha kasih sayang merangkul semua makhluk yang tertimpa kemalangan, sedangkan cinta kasih mencakup semua makhluk hidup yang berbahagia atau yang berduka, dengan arti sayang budha tidak pernah membedakan apakah dia kaya, miskin, baik ataupun buruk, atau bahkan berbeda agama, ajaran cinta kasih harus selalu diterapkan. Landasan tentang keharmonisan umat beragama dalam agama Budha, menurut Shravasti Dhammika (2006) yang dikutip dari prasasti batu kalingan No. XIII dari Raja Asoka yang berbunyi:

> Jika kita menghormati agama sendiri dan mencela agama lain tanpa suatu dasar yang kuat. Sebaliknya agama yang lainpun dihormati atas dasar-dasar tetentu. Dengan berbuat demikian kita telah membantu agama kita sendiri untuk berkembang, di samping menguntungkan pula orang lain. Dengan berbuat sebaliknya kita merugikan agama kita sendiri dan mencela agama orang lain, semata-mata didorong oleh rasa bakti terhadap agamanya sendiri dengan berfikir : “bagaimana aku dapat memuliakan agama aku sendiri”. Dengan berbuat demikian malah amat merugikan agamanya sendiri. Oleh karena itu kerukunan yang dianjurkan dengan pengertian bahwa semua orang hendaknya mendengarkan dan bersedia mendengarkan ajaran yang dianut orang lain.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, agama Budha juga mengajarkan pada pengikutnya agar senantiasa hidup harmonis dan damai dengan sesama manusia, termasuk kepada orang-orang yang bukan pemeluk agama Budha. Hal tersebut

menunjukkan bahwa dalam ajaran agama Budha juga terkenal dengan ajaran keharmonisan antar etnis antar umat beragama.

Ditinjau dari ajaran kitab seluruh agama, setiap agama selalu menghendaki persatuan dan kesatuan di atas segala perbedaan etnis atau budaya. Dalam masyarakat, baik itu suku, bangsa, agama, warna kulit, dan bahasa, fungsi keharmonisan antar etnis agar selalu bersatu dan tidak tercerai berai.

Dengan perbedaan etnis dan agama jangan sampai timbul perpecahan namun harus bertemu dalam kerukunan dan persaudaraan, hal ini akan lebih baik dari permusuhan. Karena setiap agama mempunyai unsur kebenaran maka timbulah toleransi yang sejati yaitu keinginan menggali kebenaran-kebenaran dalam agama lain dan menghargai terhadap keyakinan orang lain, meskipun tidak semua dalam keyakinan dapat disetujui.

2.4 Dasar-dasar Keharmonisan Hubungan Antar Etnis Menurut Pemerintah

Membina keharmonisan hubungan antar etnis tidaklah berarti menghambat kemajuan masing-masing etnis, melainkan menciptakan masyarakat yang dinamis yang mampu menciptakan keharmonisan, memelihara dan membina terus-menerus yang berlandaskan kebudayaan masing-masing. Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka melaksanakan program keharmonisan hubungan antar etnis, disamping ditempuh dengan ajaran dari masing-masing etnis atau budaya juga agama, mengeluarkan peraturan yang jelas berhubungan dan membantu dalam membina keharmonisan hubungan antar etnis yang majemuk di Indonesia dewasa ini. Adalah sebagai berikut:

2.4.1 Tentang Penanganan Konflik Antar Etnis

Untuk menjaga stabilitas nasional dan tegaknya kerukunan antar etnis, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan menegakkan hak asasi setiap warga negara melalui upaya penciptaan suasana yang aman, tenteram, tertib, damai, dan sejahtera, baik lahir maupun batin sebagai wujud hak setiap orang atas pelindungan agama, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Bahwa perseteruan dan/atau benturan antar kelompok masyarakat dapat menimbulkan konflik sosial yang mengakibatkan terganggunya stabilitas nasional dan terhambatnya pembangunan nasional maka dikeluarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2012 tenang penanganan konflik sosial atas dasar Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28J.

2.4.2 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Bahwa segala tindakan diskriminasi ras dan etnis bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Juga semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan berhak atas perlindungan terhadap setiap bentuk diskriminasi ras dan etnis.

Juga adanya diskriminasi ras dan etnis dalam kehidupan bermasyarakat merupakan hambatan bagi hubungan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan, maka

dirumuskanlah Undang-undang Nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Sesuai Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2).

Serta Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial,1965) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852). Juga terkandung dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

2.5 Bentuk-bentuk Keharmonisan Hubungan Antar Etnis

keharmonisan hubungan antar etnis tidak hanya diajarkan oleh satu etnis dan agama saja, melainkan seluruh etnis dan agama yang ada di Indonesia mengajarkan penganut-penganutnya untuk hidup harmonis antar sesama dalam perbedaan, saling menyayangi, hormat menghormati, dan saling menghargai. Semua etnis mengajarkan kepada umatnya untuk mengasihi sesama makhluk hidup dan bersikap positif terhadap alam. Kita semua memiliki kewajiban mengimplementasikan ajaran dasar budaya itu di dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks ini, sangatlah diperlukan pembinaan rasa saling pengertian dan komunikasi antar etnis, sebagai contoh seperti yang dilakukan nabi Muhammad ketika beliau ada di madinah. Yang pertama kali dilakukan adalah

mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dengan kaum Anshar, mengadakan kerjasama di Madinah.

Hal tersebut dilakukan nabi sebagai bentuk kerukunan, dan juga bentuk kerukunan yang lain adalah musyawarah atau dialog. Karena dengan musyawarah akan dihasilkan kebaikan, dengan jalan dialog banyak hal yang dapat diambil manfaatnya, bagi pemeluk etnis itu sendiri ataupun bagi masyarakat yang berlainan etnis, hal ini merupakan modal dasar bagi kerukunan hidup antar etnis.

Setiap etnis mengajarkan hidup bermasyarakat yang selalu bersatu dan menciptakan kedamaian dalam menjalankan kehidupan di dunia. Dengan berlandaskan ajaran-ajaran yang ada pada kitab suci mereka masing-masing, dengan demikian suasana hidup rukun dan damai dapat tercipta dengan baik.

Bentuk-bentuk keharmonisan hidup yang tercipta di Kabupaten Lampung Selatan dapat kita lihat dalam bentuk kerja sama, bergotong royong, saling membantu apabila tetangga mempunyai hajat, saling mengunjungi pada hari-hari besar keagamaan, saling menjenguk jika ada yang tertimpa musibah. Untuk mengantisipasi jika ada hal-hal yang tidak diinginkan maka dibentuk badan musyawarah yang dihadiri aparat pemerintah masyarakat, tokoh agama, dan pemuda-pemuda.

Menurut Hartoyo (1996), keserasian hubungan antar etnik, budaya, dan agama merupakan kondisi kehidupan bersama yang dinamis, yang mencerminkan sikap dan perilaku guyub, rukun dan saling menguntungkan bagi etnik, budaya, atau

agama itu sendiri. Karena dalam kondisi sosial di lapangan, perilaku gotong royong masih melekat erat dalam masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat akan bisa dikatakan rukun antar etnis jika dalam masyarakat tersebut aktif dalam kemajuan daerahnya dan juga saling menjaga komunikasi antar etnis tanpa melihat batas etnis yang memisahkan mereka. Dari serangkaian uraian yang dipaparkan di atas, maka unsur-unsur kerukunan antar etnis antara lain: 1) masyarakat ramah antar tetangga, 2) kehidupan yang terbangun harmonis, 3) gotong royong, 4) saling menutupi kekurangan, 5) cinta damai, 6) toleransi dalam beribadat, 7) menghormati hak orang lain, 8) selaras, 9) dinamika yang tenang, 10) tentram tanpa perselisihan diatas perbedaan, 11) menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, 12) menghindari ketegangan dalam pertentangan, 13) pembangunan merata dalam semua aspek, 14) seimbang antara hak dan kewajiban, 15) bersahaja, 16) saling membuka akan hal baru.

Menurut Nurani Soyumukti (2010 : 268), syarat-syarat hubungan yang harmonis juga baik adalah adanya kesetaraan, keseimbangan, dan yang lebih penting adalah adanya kepercayaan, tujuan, dan nilai yang ingin dicapai bersama dan digunakan untuk patokan dari tiap-tiap orang atau kelompok. Ini merupakan modal awal dalam membina jalannya keharmonisan hubungan antar etnis.

2.6 Faktor-faktor Pendukung Keharmonisan Hubungan Antar Etnis

Ada beberapa faktor yang mendukung terjalinnya keharmonisan hubungan antar etnis di Kabupaten Lampung Selatan antara etnis Lampung dengan etnis Bali, yakni faktor intern dan ekstern.

2.6.1 Faktor Intern

Yang dimaksud faktor intern disini adalah adanya kesadaran dari setiap individu itu sendiri untuk melakukan hal-hal yang dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat dan ini merupakan tanggung jawab dari individu itu sendiri seperti saling mengasihi, menyayangi, toleransi, dan saling bersilaturahmi.

2.6.2 Faktor Ektern

Sedangkan yang dimaksud dengan faktor ekstern adalah adanya kegiatan-kegiatan sosial yang diadakan oleh masyarakat itu sendiri seperti gotong royong, pembuatan parit jalan, karang taruna, risma, tolong menolong antar tetangga, dan ataupun aktivitas yang bersifat spontanitas.

2.7 Hambatan-hambatan Dalam Membangun Keharmonisan Hubungan Antar Etnis

Menurut Ioanes Rakhmat (2011), adapun beberapa faktor yang menghambat terjalinnya keharmonisan hubungan antara lain:

1. Fundamentalisme, skripturalisme dan literalisme yang menguat dan tampil dengan garang, militan dan takabur di mana-mana dalam dunia dewasa ini di hampir setiap etnis, yang merongrong setiap upaya membangun kehidupan yang harmonis antar etnis;
2. Pandangan dan sikap pro-Barat dan anti-Arab *versus* pandangan dan sikap pro-Arab dan anti-Barat, banyak ditemukan di Indonesia, khususnya di dalam komunitas-komunitas Kristen dan Islam, yang membuat persoalan keharmonisan umat beragama di Indonesia menjadi persoalan yang berimplikasi politik global, bukan hanya nasional atau lokal;

3. Kemiskinan yang masih mencirikan kehidupan bagian terbesar rakyat Indonesia kerap menjadi akar-akar terdalam dari setiap konflik antar umat-umat beragama yang dapat berakhir dengan korban nyawa manusia;
4. Politik oportunis *devide et impera* kalangan politikus dan kalangan militer di Indonesia dewasa ini, yang suka mengadu domba perbedaan etnis dan umat-umat beragama di Indonesia sehingga muncul konflik horisontal berdarah antar rakyat, untuk menghindari atau mengalihkan konflik vertikal antara rakyat dan penguasa politik dan militer;
5. Keberpihakan pemerintah (pusat maupun daerah) seringkali malah nyata ditujukan kepada etnis mayoritas di suatu kawasan, sehingga menimbulkan banyak penindasan dan perlakuan tidak adil terhadap etnis minoritas di kawasan yang sama;
6. Keberagamaan yang irasional mitologis masih sangat kuat dihayati oleh penduduk Indonesia, mengalahkan pola kehidupan yang bertumpu kokoh pada rasionalitas dan sains sebagai dua pemandu utama dalam pencarian dan penemuan berbagai kebenaran saintifik dan kebenaran moral.

2.8 Pengertian Konflik Sosial

Terdapat beberapa pengertian mengenai Konflik yang dikeluarkan oleh para tokoh sosiolog dunia, yang diantaranya menerangkan konflik sebagai berikut:

1. Berstein. Menurut Berstein, konflik merupakan suatu pertentangan atau perbedaan yang tidak dapat dicegah. Konflik ini mempunyai potensi yang memberikan pengaruh positif dan negatif dalam interaksi manusia.

2. Robert M.Z. Lawang. Menurut Lawang, konflik adalah perjuangan memperoleh status, nilai, kekuasaan, di mana tujuan mereka yang berkonflik tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan saingannya.
3. Ariyono Suyono Menurut Ariyono Suyono, konflik adalah proses atau keadaan di mana dua pihak berusaha menggagalkan tercapainya tujuan masing-masing disebabkan adanya perbedaan pendapat, nilai-nilai ataupun tuntutan dari masing-masing pihak.
4. James W. Vander Zanden Menurut Zanden dalam bukunya *Sociology*, konflik diartikan sebagai suatu pertentangan mengenai nilai atau tuntutan hak atas kekayaan, kekuasaan, status atau wilayah tempat yang saling berhadapan, bertujuan untuk menetralkan, merugikan ataupun menyisihkan lawan mereka.
5. Soerjono Soekamto**.** Menurut Soerjono, konflik merupakan suatu proses sosial di mana orang per orangan atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman atau kekerasan (Ajat Sudrajat, 2012).

Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa konflik berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan. Dalam bentuk ekstrimnya, konflik dilangsungkan tidak hanya sekadar untuk mempertahankan hidup dan eksistensi. Konflik juga bertujuan sampai tahap pembinasaan eksistensi orang atau kelompok lain yang dipandang sebagai lawan atau saingannya. Dan juga menurut Soerjono Soekamto

(Dalam Rendra Sulistiyo, 2012), ada empat faktor utama pemicu terjadinya konflik:

1. Perbedaan antar individu, merupakan perbedaan yang menyangkut perasaan, pendirian, atau ide yang berkaitan dengan harga diri, kebanggan, dan identitas seseorang.
2. Perbedaan kebudayaan, kepribadian seseorang dibentuk oleh keluarga dan masyarakat, tidak semua masyarakat memiliki nilai-nilai dan norma yang sama. Apa yang dianggap baik oleh satu masyarakat belum tentu baik oleh masyarakat lainnya.
3. Perbedaan kepentingan, setiap kelompok maupun individu memiliki kepentingan yang berbeda pula. Perbedaan kepentingan itu dapat menimbulkan konflik diantara mereka.
4. Perubahan sosial, perubahan yang terlalu cepat yang terjadi pada suatu masyarakat dapat mengganggu keseimbangan sistem nilai dan norma yang berlaku, akibatnya konflik dapat terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara harapan individu dengan masyarakat.

Lebih jauh Soerjono Soekamto (dalam Bondet Wrahatnala, 2012) menerangkan, ada lima bentuk khusus konflik yang terjadi dalam masyarakat. Kelima bentuk itu adalah:

1. Konflik pribadi, yaitu konflik yang terjadi di antara orang perorangan karena masalah-masalah pribadi atau perbedaan pandangan antarpribadi dalam menyikapi suatu hal. Misalnya individu yang terlibat utang, atau masalah pembagian warisan dalam keluarga.

2. Konflik politik, yaitu konflik yang terjadi akibat kepentingan atau tujuan politis yang berbeda antara seseorang atau kelompok. Seperti perbedaan pandangan antarpartai politik karena perbedaan ideologi, asas perjuangan, dan cita-cita politik masing-masing. Misalnya bentrokan antarpartai politik pada saat kampanye.
3. Konflik rasial, yaitu konflik yang terjadi di antara kelompok ras yang berbeda karena adanya kepentingan dan kebudayaan yang saling bertabrakan. Misalnya konflik antara orang-orang kulit hitam dengan kulit putih akibat diskriminasi ras (rasialisme) di Amerika Serikat dan Afrika Selatan.
4. Konflik antar kelas sosial, yaitu konflik yang muncul karena adanya perbedaan-perbedaan kepentingan di antara kelaskelas yang ada di masyarakat. Misalnya konflik antara buruh dengan pimpinan dalam sebuah perusahaan yang menuntut kenaikan upah.
5. Konflik yang bersifat internasional, yaitu konflik yang melibatkan beberapa kelompok negara (blok) karena perbedaan kepentingan masing-masing. Misalnya konflik antara negara Irak dan Amerika Serikat yang melibatkan beberapa negara besar.

Secara manajemen konflik, terdapat beberapa cara dalam upaya mengendalikan atau meredakan sebuah konflik, yaitu dengan gaya pendekatan seseorang atau kelompok dalam menghadapi situasi konflik dapat dilaksanakan sehubungan dengan tekanan relatif atas apa yang dinamakan *cooperativeness* dan *assertiveness*. *Cooperativiness* adalah keinginan untuk memenuhi kebutuhan dan

minat individu atau kelompok lain, sedangkan *assertivenes* merupakan keinginan untuk memenuhi kebutuhan dan minat individu atau kelompok sendiri.

Ada lima gaya menejemen konflik berkaitan dengan adanya tekanan relatif di antara keinginan untuk menuju kearah *cooperativeness* atau *assertiveness* sesuai dengan intensitasnya, yaitu sebagai berikut:

1. Tindakan menghindari, bersikap tidak kooperatif dan tidak assertif, menarik diri dari situasi yang berkembang dan atau bersikap netral dalam segala macam cuaca.
2. Kompetisi atau komando otoritatif, bersikap tidak kooperatif, tetapi asertif, bekerja dengan cara menentang keinginan pihak lain, berjuang untuk mendominasi dalam situasi menang atau kalah dan atau memaksakan segala sesuatu agar sesuai dengan kesimpulan tertentu dengan menggunakan kekuasaan yang ada.
3. Akomodasi atau meratakan, bersikap kooperatif, tetapi tidak asertif, membiarkan keinginan pihak lain menonjol, meratakan perbedaan-perbedaan guna mempertahankan keharmonisan yang diusahakan secara buatan.
4. Kompromis, bersikap cukup kooperatif dan juga asertif dalam intensitas yang cukup. Bekerja menuju kearah pemuasan pihak-pihak yang berkepentingan, mengupayakan tawar-menawar untuk mencapai pemecahan yang dapat diterima kedua belah pihak meskipun tidak sampai tingkat optimal, tak seorangpun merasa menang, dan tak seorangpun merasa bahwa yang bersangkutan menang atau kalah secara mutlak.

5. Kolaborasi (kerjasama), Bersikap kooperatif maupun asertif, berusaha untuk mencapai kepuasaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan jalan bekerja melalui perbedaan-perbedaan yang ada, mencari dan memecahkan masalah hingga setiap individu atau kelompok mencapai keuntungan masing-masing sesuai dengan harapannya (Soerjono Soekamto, 2007).

2.9 Definisi Kebudayaan Menurut Sosiologi

Kebudayaan merupakan suatu penciptaan di setiap sendi-sendi kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Bagi Karl Marx yang berpihak kepada faham materialistik dan strukturalistik, ide-ide kebudayaan dipandang sebagai produk dari hubungan-hubungan ekonomi. Sementara itu bagi Weber yang lebih berpihak pada faham konstruksianis melihat sebaliknya. Bahwa struktur ekonomi itu tidak lebih dari konsekuensi saja dari kebudayaan. Lebih jauh, weber mengemukaan sistem kebudayaan adalah otonom, berevolusi sendiri tanpa terpengaruh oleh yang lain. Sebaliknya dalam pandangan Marx ide kebudayaan didikte oleh keadaan materi tertentu dalam hal ini struktur ekonomi (Poison Opick, 2011).

Dari dua perbedaan besar tersebut kemudian berkembang dua arus pemikiran yang di samping mendukung juga melakukan kritik dan merevisi. Dari Marx, muncul faham neomarxis antara lain Gramsci dan Lukacs. Sedangkan dari Weber muncul tokoh-tokoh konstruksionis kontemporer yaitu Habermas, Blias, dan Bourdieu.

Menurut Antonio Gramsci tentang kebudayaan, menganggap bahwa faktor politiklah yang lebih penting. Bahkan Gramsci mengemukakan bahwa budaya

bukan untuk dibentuk saja tetapi sekaligus juga pembentuk kesadaran. Menurut William F. Ogburn mengenai teknologi dan kebudayaan, perubahan kebudayaan material cenderung terjadi lebih dahulu ketimbang kebudayaan nonmaterial. Dalam proses reaktif kebudayaan non material atas perubahan yang terjadi pada kebudayaan material tersebut memungkinkan terjadinya cultural lag. Muculnya perubahan budaya material itu adalah akibat adanya penemuan, dan penemuan adalah didahului oleh adanya proses mental oleh individu-individu tertentu yang bersifat nonmaterial (Poison Opick, 2011).

Habermas berpendapat bahwa pengetahuan adalah dasar dari kebudayaan. Dalam hal ini manusia sebagai produsen budaya memiliki tiga kemungkinan pemaknaan atas hal-hal yang memungkinkan terbentuknya organisasi sosial, yaitu bekerja, berkomunikasi dan mengasah kemerdekaan berpikir. Tapi bila untuk menjelaskan manusia dalam kaitannya dengan kebudayaan, pekerjaan merupakan hubungan ekonomis yang tidak seimbang, karena pengetahuan adalah dasar dari kebudayaan.

Realitas sosial budaya adalah kenyataan sosial dan budaya di bentuk dari interaksi dan tindakan sosial yang terus menerus. Menurut Berger dan Lucman (dalam Machfudi, 2011) kenyataan sosial ada 2 yaitu objektif dan subjektif.

1. Kenyataan sosial objektif memiliki karakteristik sebagai berikut:
   a. Bersifat eksternal yaitu di bentuk oleh budaya masyarakat dan berada di luar kesadaran manusia contoh: nilai, norma, dan bahasa.
   b. Bersifat memaksa individu agar sesuai dengan lingkungan sosialnya, contoh setiap pelanggar nilai dan norma pasti di kenakan sanksi

c. Bersifat umum dan menjadi milik bersama contoh semua aturan masyarakat merupakan kesepakatan yang sudah diakui kebenarannya bersama-sama.

2. Kenyataan sosial subjektif adalah persepsi atau sudut pandang yang di bentuk atas dasar pengalaman individu untuk menilai sesuatu.

2.10 Definisi Kebudayaan Menurut Antropologi

Ilmu antropologi sering kali sangat berbeda dengan berbagai ilmu lain, juga apabila dibandingkan dengan arti yang biasanya diberikan kepada konsep itu dalam bahasa sehari-hari, yaitu arti yang terbatas kepada hal-hal yang indah seperti candi, tari-tarian, seni rupa, seni suara, kesusasteraan dan filsafat, definisi ilmu antropologi lebih luas sifat dan ruang lingkupnya. Menurut ilmu antropologi, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar (Koenjaraningrat, 1990).

Kata kebudayaan berasal dari kata sanskerta yaitu *buddhayah,* yaitu bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti budi atau akal, dengan demikian kebudayaan dapat diartikan hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Ada sarjana lain yang mengupas kata budaya sebagai suatu perkembangan dari majemuk budi-daya, yang berarti daya dari budi. Karena itu mereka membedakan budaya dari kebudayaan. Demikianlah budaya berarti daya dari budi, yang berupa cipta, karsa, dan rasa, sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cpta, karsa, dan rasa itu.

Talcott Parsons dan A.L. Kroeber pernah membesakan secara tajam wujud kebudayaan sebagai suatu sistem dari ide-ide dan konsep-konsep dari wujud

kebudayaan sebagai suatu rangkaian tindakan dan aktivitas manusia yang berpola. J.J. Honigman membedakan adanya tiga gejala kebudayaan yaitu, *Ideas*, *Activities*, dan *Artifacts*. Sedangkan menurut Koenjaraningrat tiga wujud kebudayaan yaitu, (1) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya, (2) wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat, (3) wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia (Koenjaraningrat, 1990).

2.11 Unsur-unsur Kebudayaan

Para tokoh antropologi menyebutkan kebudayaan merupakan suatu keseluruhan yang terintegrasi, pada saat analisa membagi keseluruhan itu kedalam unsur-unsur besar yang disebut unsur-unsur kebudayaan universal. C. Kluckhohn (1953, dalam Koenjaraningrat: 1990), mengambil sari dari berbagai kerangka tentang unsur-unsur kebudayaan universal antara lain: (1) bahasa, (2) sistem pengetahuan, (3) organisasi sosial, (4) sistem peralatan hidup dan teknologi, (5) sistem mata pencaharian hidup, (6) sistem religi, (7) kesenian.

Wujud sistem budaya dari suatu unsur kebudayaan universal berupa adat atau etnis, ketujuh unsur kebudayaan universal itu masing-masing tentu juga mempunyai wujud fisik, walaupun tidak ada satu wujud fisik untuk keseluruhan dari satu unsur kebudayaan universal. Namun, semua unsur kebudayaan fisik sudah tentu secara khusus terdiri dari benda-benda kebudayaan.

2.12 Kebudayaan dan Kerangka Teori Tindakan

Pandangan menyeluruh dan terintegrasi mengenai konsep kebudayaan ini dapat kita mantapkan dengan mempergunakan sebuah kerangka yang disusun, kerangka yang memandang kebudayaan sebagai suatu tindakan manusia yang berpola, yang di dalamnya mengandung konsepsi sebagai berikut:

1. Sistem kebudayaan atau *cultural system* merupakan komponen yang abstrak terdiri dari pikiran-pikiran, gagasan-gagasan, konsep-konsep, tema-tema berpikir, dan keyakinan-keyakinan. Dengan demikian sistem budaya adalah bagian dari kebudayaan yang dalam bahasa indonesia lebih lazim disebut adat-istiadat, diantara adat-istiadat ada sistem nilai normanya yang secara khusus lagi dapat diperinci ke dalam beberapa macam norma menurut pranata-pranata yang ada dalam masyarakat bersangkutan. Fungsi dari sistem budaya adalah menata dan memantapkan tindakan-tindakan serta tingkah laku manusia.
2. Sistem sosial atau *social system*, terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia atau tindakan-tindakan dan tingkah laku berinteraksi antar individu dalam rangka kehidupan masyarakat. Sebagai rangkaian tindakan berpola yang berkaitan satu dengan yang lain, sistem sosial itu bersifat lebih konkret dan nyata dari sistem budaya, dalam arti bahwa tindakan manusia itu dapat dilihat dan diobservasi, interaksi manusia itu disatu pihak ditata dan diatur oleh sistem budaya, tetapi dipihak lain kebudayaan menjadi pranata-pranata oleh nilai-nilai dan norma-norma tersebut.
3. Sistem kepribadian atau *personality system*, mengenai soal isi jiwa dan watak individu yang berinteraksi sebagai warga masyarakat. Kepribadian

suatu individu dalam masyarakat, walaupun berbeda-beda satu dengan yang lain, namun juga distimulasi dan dipengaruhi oleh niai-nilai dan norma-norma dalam sistem budaya dan oleh pola-pola bertindak dalam sistem sosial yang telah diinternalisasinya melalui proses sosialisasi dan proses pembudayaan selama hidup sejak masa kecil individu tersebut. Dengan demikian sistem kepribadian manusia berfungsi sebagai sumber motivasi dari tindakan sosialnya.

4. Sistem organik atau *organic system*, melengkapi seluruh kerangka dengan mengikut-sertakan ke dalamnya proses biologi serta bio-kimia dalam organisme manusia sebagai suatu jenis makhluk alamiah yang apabila dipikirkan lebih mendalam, juga ikut menentukan kepribadian individu, pola-pola tindakan manusia, dan bahkan juga gagasan-gagasan yang dicetuskannya (Koentjaraningrat, 1990).

2.13 Adat-Istiadat

Menurut Koenjaraningrat (1990), dari sistem nilai budaya, pandangan hidup, dan idiologi, sistem nilai bedayalah merupakan tingkat yang paling tinggi dan yang paling abstrak dari adat-istiadat. Hal itu disebabkan karena nilai-nilai budaya merupakan konsep-konsep mengenai apa yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar dari warga masyarakat mengenai apa yang mereka anggap bernilai, berharga, dan penting dalam hidup sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi dalam kehidupan pada warga masyarakat tersebut.

Adat-istiadat, norma diatas adalah bahwa nilai-nilai budaya sebagai pedoman yang memberi arah dan orientasi terhadap hidup, bersifat amat umum. Sebaliknya norma yang merupakan aturan-aturan untuk bertindak bersifat khusus, sedangkan perumusannya biasanya bersifat amat terperinci, jelas, tegas, dan tak meragukan.

Terdapat beberapa batasan yang membedakan antara adat dengan hukum adat menurut L. Pospisil (1956, dalam Koenjaraningrat 1990):

1. Hukum adalah suatu aktivitas di dalam rangka suatu kebudayaan yang mempunyai fungsi pengawasan sosial. Untuk membedakan aktivitas itu dengan aktivitas-aktivitas kebudayaan lain yang mempunyai fungsi serupa dalam masyarakat ada empat ciri dari hukum atau *Attributes of Law.*
2. Yang pertama *Attributes of Authority,* atribut otoritas atau kekuasaan menentukan bahwa aktivitas kebudayaan yang disebut hukum itu adalah keputusan-keputusan melalui mekanisme yang diberi wewenang dan kekuasaan kepada masyarakat.
3. Yang kedua adalah *Attribute of Intention of Universal Applications,* menentukan bahwa keputusan-keputusan dari pihak yang berkuasa itu harus dimaksudkan sebagai keputusan-keputusan yang mempunyai jangka waktu panjang dan yang harus dianggap berlaku juga terhadap peristiwa-peristiwa yang serupa dalam masa yang akan datang.
4. Ketiga disebut *Attribute of Obligation,* keputusan dari pemegang kuasa harus mengandung perumusan dari kewajiban pihak kesatu terhadap pihak kedua, tetapi juga hak dari pihak kedua yang harus dipenuhi oleh

pihak kesatu, dalam hal ini, pihak kesatu dan kedua harus merupakan individu-individu yang hidup.

5. Keempat adalah *Attribute of Sanction*, menentukan keputusan-keputusan dari pihak berkuasa itu harus dikuatkan dengan sanksi dalam arti seluas-luasnya.

2.14 Kebudayaan Adat Bali

Penghuni pertama pulau Bali diperkirakan datang pada 3000-2500 SM yang bermigrasi dari Asia, peninggalan peralatan batu dari masa tersebut ditemukan di desa Cekik yang terletak di bagian barat pulau. Zaman prasejarah kemudian berakhir dengan datangnya ajaran Hindu dan tulisan Sansekerta dari India pada 100 SM. Kebudayaan Bali kemudian mendapat pengaruh kuat kebudayaan India, yang prosesnya semakin cepat setelah abad ke-1 Masehi. Nama Balidwipa (pulau Bali) mulai ditemukan di berbagai prasasti, diantaranya Prasasti Blanjong yang dikeluarkan oleh Sri Kesari Warmadewa pada 913 M dan menyebutkan kata Walidwipa.

Diperkirakan sekitar masa inilah sistem irigasi subak untuk penanaman padi mulai dikembangkan. Beberapa tradisi keagamaan dan budaya juga mulai berkembang pada masa itu. Kerajaan Majapahit (1293–1500 AD) yang beragama Hindu dan berpusat di pulau Jawa, pernah mendirikan kerajaan bawahan di Bali sekitar tahun 1343 M. Saat itu hampir seluruh nusantara beragama Hindu, namun seiring datangnya Islam berdirilah kerajaan-kerajaan Islam di nusantara yang antara lain menyebabkan keruntuhan Majapahit. Banyak bangsawan, pendeta, artis, dan masyarakat Hindu lainnya yang ketika itu menyingkir dari Pulau Jawa ke Bali.

Pada tahun 1946 Belanda menjadikan Bali sebagai salah satu dari 13 wilayah bagian dari Negara Indonesia Timur yang baru diproklamasikan, yaitu sebagai salah satu negara saingan bagi Republik Indonesia yang diproklamasikan dan dikepalai oleh Sukarno dan Hatta. Bali kemudian juga dimasukkan ke dalam Republik Indonesia Serikat ketika Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 29 Desember 1949.

Di Bali berlaku sistem Catur Varna (Warna), yang mana kata Catur Warna berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata Catur berarti empat dan kata warna yang artinya memilih. Catur Warna berarti empat pilihan hidup atau empat pembagian dalam kehidupan berdasarkan atas bakat (guna) dan ketrampilan (karma) seseorang, serta kualitas kerja yang dimiliki sebagai akibat pendidikan, pengembangan bakat yang tumbuh dari dalam dirinya dan ditopang oleh ketangguhan mentalnya dalam menghadapi suatu pekerjaan. Empat golongan yang kemudian terkenal dengan istilah Catur Warna itu ialah: Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra:

1. Warna Brahmana: Disimbolkan dengan warna putih, adalah golongan fungsional di dalam masyarakat yang setiap orangnya menitikberatkan pengabdian dalam swadharmanya di bidang kerohanian keagamaan.
2. Warna Ksatrya: Disimbolkan dengan warna merah adalah golongan fungsional di dalam masyarakat yang setiap orangnya menitikberatkan pengabdian dalam swadharmanya di bidang kepemimpinan, keperwiraan dan pertahanan keamanan negara.
3. Warna Waisya: Disimbolkan dengan warna kuning adalah golongan fungsional di dalam masyarakat yang setiap orangnya menitikberatkan

pengabdiannya di bidang kesejahteraan masyarakat (perekonomian, perindustrian, dan lain- lain).

4. Warna Sudra: Disimbolkan dengan warna hitam adalah golongan fungsional di dalam masyarakat yang setiap orangnya menitikberatkan pengabdiannya di bidang ketenagakerjaan.

Dalam perjalanan kehidupan di masyarakat dari masa ke masa pelaksanaan sistem catur warna cenderung membaur mengarah kepada sistem yang tertutup yang disebut catur wangsa atau turunan darah. Padahal catur warna menunjukkan pengertian golongan fungsional, sedangkan catur wangsa menunjukkan turunan darah (Winda A. Pratiwi, 2011).

2.15 Kebudayaan Adat Lampung

Bersamaan dengan masuknya agama Islam dari Banten ke Lampung pada masa Sultan Maulana Hasanuddin abad ke-16, Lampung berada di bawah pengaruh Kesultanan Banten. Konon kabarnya Fatahillah (panglima Demak asal Pasai, pendiri kota Jakarta, dan pelopor pengislaman Banten) menikahi Putri Sinar Alam dari Keratuan Darah Putih di Lampung. Menurut Thomas Walker Arnold dalam bukunya *The Preaching of Islam*, yang diterjemahkan oleh Nawawi Rambe "Sejarah Da'wah Islam" (Widjaya, Jakarta, 1979, 324), Islam masuk ke Lampung dari Banten dengan dibawa oleh seorang pemimpin adat Lampung yang bernama Minak Kemala Bumi (Hasiri. 2009).

Daerah Lampung dibagi menjadi beberapa *kejonjoman* (semacam kabupaten) yang masing-masing dikepalai seorang *jonjom* mewakili sultan Banten. Ketika Banten dikalahkan VOC pada abad ke-18 (sekitar tahun 1750), Lampung ikut

menjadi daerah jajahan Belanda. Tetapi ini hanya di atas kertas perjanjian VOC dengan Banten, sebab kenyataannya kekuasaan kolonial baru tertanam di Lampung pada tahun 1817, dengan terbentuknya *Lampongsche Districten* di bawah seorang residen yang berkedudukan di Terbanggi. Pada tahun 1847, pemerintah Hindia-Belanda memindahkan ibukota (kedudukan residen) dari Terbanggi ke Teluk Betung.

Perlawanan yang terkenal dalam menentang kolonialisme Belanda adalah Perang Lampung (*Lampong Oorlog*) pada abad ke-19 yang dilancarkan oleh Radin Intan dari Kalianda selama 30 tahun (1826-1856), sezaman dengan Perang Jawa dari Pangeran Diponegoro serta Perang Paderi dari Tuanku Imam Bonjol. Perang Lampung berakhir dengan gugurnya Radin Intan. Kini Radin Intan telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai salah seorang Pahlawan Nasional (Hasiri, 2009).

Orang Lampung pada umumnya beragama Islam, masyarakat adat Lampung dapat dibedakan dalam dua golongan adat, yaitu yang beradat Pepadun dan beradat Pesisir. Dialek bahasanya ada yang berdialek *nyou* (apa) atau dialek bahasa Abung dan ada pula yang berdialek *api* (apa) atau berdialek Pemanggilan.

Mereka yang beradat Pepadun kebanyakan bermukim di daerah pedalaman, sedangkan yang beradat Pesisir bermukim di daerah pesisir atau di daerah yang tidak termasuk daerah lingkungan pepadun. Termasuk dalam lingkungan beradat pepadun adalah orang-orang Abung, Tulangbawang (Menggala), Waikanan Sungkai, Pubiyan. Sedangkan dalam lingkungan beradat Pesisir adalah orang-orang Pesisir Teluk, Pesisir Semangka, Pesisir Krui, dan dataran tinggi Belalau di

daerah Provinsi Lampung, serta orang-orang Ranau, Muaradua, Komering, dan Kayuagung di Provinsi Sumatera Selatan dan juga di pedesaan Cikoneng (Anyer), pantai barat, Jawa Barat (Munawaroh, 2007).

Lebih jauh menurut Munawaroh (2007), masyarakat Lampung merupakan masyarakat kekerabatan bertali darah menurut garis ayah (*Geneologis-Patrilinial*), yang terbagi-bagi dalam masyarakat keturunan menurut moyang asalnya masing-masing yang disebut *buay*, misalnya *Buay Nunyai, Buay Unyi, Buay Nuban, Buay Subing, Buwai Bolan, Buayi Menyarakat, Buay Tambapupus, Buay Tungak, Buay Nyerupa, Buay Belunguh,* dan sebagainya. Setiap kebuayan itu terdiri dari berbagai *jurai* dari kebuwaian, yang terbagi-bagi pula dalam beberapa kerabat yang terikat pada satu kesatuan rumah asal *Nuwou Tubou, Lamban Tuha* yang artinya rumah tua/rumah besar, rumah tempat bermusyawarah untuk memutuskan satu atau beberapa masalah dalam keluarga/adat.

Hubungan kekerabatan adat lampung terdiri dari lima unsur yang merupakan lima kelompok. Pertama, kelompok *wari* atau *adik wari*, terdiri dari semua saudara laki-laki yang bertalian darah menurut garis ayah, termasuk saudara angkat yang bertali darah. Kedua, kelompok *lebuklama* yang terdiri dari saudara laki-laki dari nenek (ibu dari ayah) dan keturunannya dan saudara laki-laki dari ibu dan keturunannya. Ketiga, kelompok *baimenulung* yang terdiri dari saudara-saudara wanita dari ayah dan keturunannya. Keempat, kelompok *kenubi* yang terdiri dari saudara-saudara karena ibu bersaudara dan keturunannya. Kelima, kelompok *lakau-maru*, yaitu para ipar pria dan wanita serta kerabatnya dan para saudara karena istri bersaudara dan kerabat.